

PEMBAHASAN
UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI

**Edisi
Kedua**

R. Wiyono, S.H.



SINAR GRAFIKA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA.....	ix

BAGIAN KESATU

Pendahuluan	3
-------------------	---

BAGIAN KEDUA

Perumusan Tindak Pidana Korupsi	9
---------------------------------------	---

BAGIAN KETIGA

Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	15
--	----

BAGIAN KEEMPAT

Bab I	Ketentuan Umum	21
Pasal 1		21
Bab II	Tindak Pidana Korupsi	27
Pasal 2		27
Pasal 3		45
Pasal 4		55
Pasal 5		58
Pasal 6		65
Pasal 7		69
Pasal 8		79
Pasal 9		87

Pasal 10	91
Pasal 11	97
Pasal 12	102
Pasal 12 A	120
Pasal 12 B	122
Pasal 12 C	126
Pasal 13	129
Pasal 14	132
Pasal 15	134
Pasal 16	136
Pasal 17	139
Pasal 18	140
Pasal 19	150
Pasal 20	153
Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	158
Pasal 21	158
Pasal 22	160
Pasal 23	162
Pasal 24	163
Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	165
Pasal 25	165
Pasal 26	166
Pasal 26 A	183
Pasal 27	185
Pasal 28	186
Pasal 29	187
Pasal 30	194
Pasal 31	196
Pasal 32	198
Pasal 33	202
Pasal 34	204
Pasal 35	207
Pasal 36	209
Pasal 37	211
Pasal 37 A	219
Pasal 38	223
Pasal 38 A	233

Pasal 38 B	234
Pasal 38 C	241
Pasal 39	243
Pasal 40	247
Bab V Peran Serta Masyarakat	248
Pasal 41	248
Pasal 42	253
Bab VI Ketentuan Lain-Lain	255
Pasal 43	255
Bab VI A Ketentuan Peralihan	263
Pasal 43 A	263
Bab VII Ketentuan Penutup	270
Pasal 43 B	270
Pasal 44	271
Pasal 45	273

LAMPIRAN:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 277
2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ... 302
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 316

DAFTAR PUSTAKA	321
-----------------------	------------